



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 130/Kep. 1103-PEM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
DESA/KELURAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa juncto Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka, pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang ..... 2



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
  - b. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dengan instansi terkait;

e. Melakukan .... 4



- e. Melakukan supervisi – teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa/Kelurahan;
- f. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- g. Mengusulkan dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- h. Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa;
- i. Fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara mandiri atas usulan/inisiatif Desa itu sendiri dan sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan; dan
- j. Melaporkan semua hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Majalengka.

**KEEMPAT** : Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Seketaris Daerah Kabupaten Majalengka.

**KELIMA** : Biaya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 130/Kep. 1103-PEM/2021  
 Tanggal : 03 November 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN  
 PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
 DESA/KELURAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten  
Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Anggota :
  1. Camat setempat.
  2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat  
Daerah Kabupaten Majalengka.
  3. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana  
Sarana Utilitas pada Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Majalengka.
  4. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas  
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Majalengka.
  5. Kepala Bidang Infrastruktur dan  
Kewilayahan pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, Penelitian dan  
Pengembangan Kabupaten Majalengka.
  6. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Majalengka.
  7. Kepala Sub Bagian Administrasi  
Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada  
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Majalengka.
  8. Kepala Sub Bagian Administrasi  
Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
  9. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian  
Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Majalengka.

10. Kepala Sub ..... 6

10. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
11. Kepala Seksi Pertanahan pada Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
12. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
13. Kepala Desa setempat.
14. Tokoh Masyarakat Desa setempat.
15. Kelompok Kerja Teknis.

BUPATI MAJALENGKA,

